JURNAL EKOBISMEN
P-ISSN 2774-8189
E-ISSN 2774-8170
FAKULTAS EKONOMI UNIGHA
Volume 5, Nomor 2, 2025

Tinjauan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial oleh Dinas Sosial Aceh

Review of the Implementation of Social Assistance Distribution by the Aceh Social Service

Maulia Putri Dinanti[1], Zahriatul Aini[2*], Mirnawati[3]
Manajemen Keuangan Sektor Publik[1], Administrasi Perkantoran[2,3], Politeknik Kutaraja
Email: pdina3951@gmail.com, zahriatulaini@poltekkutaraja.ac.id, mirnawati@poltekkutaraja.ac.id
*Correspondence

Info Artikel

Riwayat Artikel:
Diterima: 17 Mei 2025
Direvisi: 3 Juni 2025
Dipublikasikan: 30 Juni 2025

Nomor DOI
10.47647/jeko.v%vi%i.3084

Cara Mensitasi :
Dinanti, M. P., Aini, Z.,& Mirnawati, M. (2025). Tinjauan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial oleh Dinas Sosial Aceh. *Jurnal Ekobismen*, 5(2), 163-172

Abstrak

Penyaluran bantuan sosial di Provinsi Aceh pada tahun 2024 melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) menunjukkan kinerja yang cukup efektif meskipun masih terdapat beberapa tantangan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas penyaluran bantuan sosial oleh Dinas Sosial Aceh dengan mengukur ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan jumlah, dan efisiensi distribusi. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa tingkat realisasi penyaluran PKH dan BPNT berada di kisaran 91-93%, ketepatan sasaran mencapai sekitar 92%, dan ketepatan waktu mencapai 100%. Namun, terdapat ketimpangan efektivitas antar kabupaten/kota serta keterbatasan dalam transparansi dan akuntabilitas yang menghambat deteksi penyimpangan. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya pemutakhiran data penerima secara berkala, peningkatan kapasitas daerah dengan capaian rendah, diversifikasi jalur distribusi, dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi penyaluran bantuan sosial di masa mendatang.

Kata Kunci: Bantuan Sosial, PKH, BPNT, Efektivitas, Ketepatan Sasaran, Transparansi

Abstract

The distribution of social assistance in Aceh Province in 2024 through the Family Hope Program (PKH) and Non-Cash Food Assistance (BPNT) has demonstrated fairly effective performance despite some challenges. This study aims to evaluate the effectiveness of social assistance distribution by the Aceh Social Service by assessing targeting accuracy, timeliness, accuracy of amount, and distribution efficiency. A qualitative descriptive approach was employed, collecting data through interviews with relevant staff and documentary studies of the 2024 social assistance distribution. The results show that the realization of PKH and BPNT distribution ranges between 91% and 93%, targeting accuracy reaches approximately 92%, and timeliness achieves 100%. However, disparities exist among districts/cities, alongside limitations in transparency and accountability that hinder the detection of irregularities. The findings imply the need for regular updates of recipient data, capacity building in low-achieving areas, diversification of distribution channels, and strengthening monitoring and evaluation systems to enhance the effectiveness and transparency of social assistance distribution in the future.

Keywords: *Social Service, PKH, BPNT, effectiveness, targeting accuracy, transparency.*

PENDAHULUAN

Bantuan sosial merupakan salah satu instrumen kebijakan publik yang penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan secara sosial dan ekonomi. Pemerintah Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah mengimplementasikan berbagai program bantuan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dan jaminan keberlangsungan hidup masyarakat miskin. Di tingkat daerah, tanggung jawab pelaksanaan program ini berada pada lembaga teknis seperti Dinas Sosial, yang berperan dalam menyalurkan bantuan secara tepat sasaran dan efisien (Sihombing et al., 2024).

Dinas Sosial Provinsi Aceh memiliki peran strategis dalam menyalurkan berbagai jenis bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). PKH merupakan bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui pendidikan dan kesehatan. Penerima manfaat diwajibkan untuk memastikan anak-anak bersekolah dan ibu hamil menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sementara itu, BPNT ditujukan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat miskin melalui pemberian bantuan dalam bentuk non-tunai yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan pokok di e-warung yang telah ditunjuk sebagai mitra resmi. Meskipun kedua program tersebut memiliki sasaran yang jelas dan mekanisme distribusi yang terstruktur, pelaksanaannya di lapangan tidak lepas dari berbagai kendala. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain ketidaktepatan dalam identifikasi penerima manfaat, keterlambatan distribusi, kelemahan dalam sistem verifikasi data, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Permasalahan-permasalahan ini dapat menghambat tujuan utama dari program bantuan sosial, yaitu membantu masyarakat miskin secara efektif dan berkelanjutan (Purbaningrum & Adinugraha, 2024).

Tingkat kemiskinan di Aceh sendiri tergolong tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 804.530 orang atau 14,23% dari total penduduk. Sementara itu, data pada September 2024 menunjukkan sedikit penurunan menjadi 12,64%. Meski tren menunjukkan perbaikan, capaian ini masih menunjukkan bahwa hampir 1 dari 8 penduduk Aceh hidup dalam kondisi miskin (BPS Provinsi Aceh, 2024).

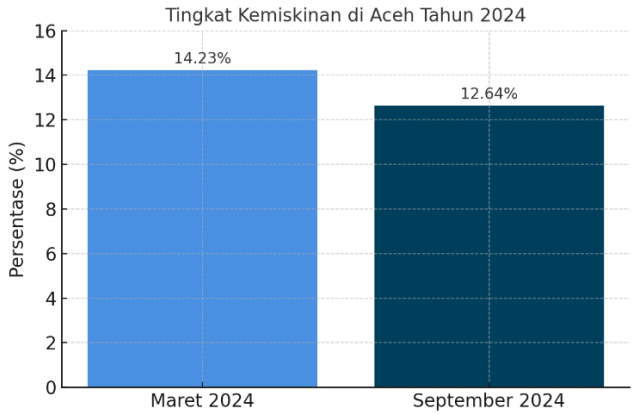

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, 2024

Gambar 1. Tingkat Kemisikinan

Secara normatif, pelaksanaan bantuan sosial di Aceh juga diatur dalam (Qanun Nomor 11 Tahun, 2013) tentang Kesejahteraan Sosial, yang menegaskan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan sosial bagi warga yang rentan. Qanun ini memberikan kerangka hukum bagi Dinas Sosial Aceh dalam mendistribusikan program bantuan agar lebih terpadu, transparan, dan tepat sasaran. Namun, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Evaluasi oleh Lembaga Auditor dan berbagai laporan independen menunjukkan adanya inkonsistensi antara data DTKS dengan kondisi riil penerima di masyarakat, serta lemahnya pemutakhiran data secara berkala (Santoso et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan penyaluran bansos oleh Dinas Sosial Aceh pada tahun 2024. Fokus utama adalah mengkaji sejauh mana pelaksanaan tersebut mencerminkan prinsip ketepatan sasaran, efisiensi anggaran, dan dampak terhadap kesejahteraan penerima manfaat. Penelitian ini juga akan menganalisis hubungan antara jumlah bantuan yang disalurkan, jumlah penerima manfaat, dan alokasi anggaran sebagai indikator ketercapaian program. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan guna memperkuat tata kelola program bansos di Aceh, sehingga ke depan lebih akuntabel, responsif terhadap kondisi sosial masyarakat, dan berkontribusi nyata terhadap pengurangan angka kemiskinan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan bagian dari sistem perlindungan sosial yang dirancang untuk memberikan jaminan dasar bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Menurut beberapa studi (Follett & Henderson, 2023; Prihantika et al., 2024; Wu, 2025), bantuan sosial bertujuan untuk melindungi individu dari risiko sosial dan ekonomi, menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, serta mengurangi ketimpangan sosial dan kemiskinan ekstrem. Bantuan ini juga berperan dalam meningkatkan inklusi sosial dan mendukung pemulihan pasca bencana atau krisis. Studi oleh (Pratiwi & Imsar, 2022), pemerintah secara berkelanjutan menjadikan upaya pengurangan kemiskinan sebagai prioritas utama dalam pembangunan melalui pelaksanaan program bantuan sosial yang menyasar keluarga kurang mampu. Kemiskinan sendiri diartikan sebagai kondisi ketika individu atau kelompok dalam sebuah keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Menurut penelitian oleh (Claudia et al., 2025) prinsip dasar dari bantuan sosial meliputi: (1) keadilan sosial, yakni memberikan bantuan kepada mereka yang paling membutuhkan; (2) non-diskriminasi, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan; (3) ketepatan sasaran, berdasarkan data valid seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); (4) transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaporan; (5) partisipasi masyarakat, termasuk dalam tahap perencanaan dan evaluasi; serta (6) kondisionalitas, di mana bantuan diberikan berdasarkan pemenuhan syarat tertentu (*conditional cash transfer*).

Program bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) merupakan bentuk bantuan sosial yang telah mengalami reformasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitasnya. PKH berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui intervensi di bidang pendidikan dan kesehatan, sementara BPNT bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga miskin dengan sistem distribusi nontunai yang lebih terkontrol.

Teori Efektivitas Program Sosial

Efektivitas dalam konteks program sosial merujuk pada sejauh mana program mampu mencapai tujuannya secara optimal dengan mempertimbangkan ketepatan distribusi, ketepatan waktu, serta efisiensi pelaksanaan. Dalam program bantuan sosial, efektivitas dapat dinilai dari indikator-indikator yang berkaitan langsung dengan proses implementasi teknis di lapangan.

Merujuk pada pendekatan evaluasi program publik, efektivitas pelaksanaan bantuan sosial dapat dianalisis melalui empat indikator utama (Sanjaya & Indarto, 2025; Widayanti & Rosdiana, 2019):

1. Tepat sasaran, yakni kesesuaian antara penerima bantuan dan kriteria yang telah ditentukan;
2. Tepat waktu, yaitu sejauh mana distribusi bantuan dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan;
3. Tepat jumlah, mengacu pada kesesuaian jumlah bantuan yang diterima dengan jumlah yang ditetapkan;
4. Efisiensi penyaluran, yang menunjukkan bagaimana sumber daya (termasuk waktu, tenaga, dan anggaran) digunakan secara optimal dalam proses distribusi.

Berbagai studi sebelumnya menunjukkan pentingnya evaluasi efektivitas dalam program bantuan sosial. Penelitian oleh (Tamrin, 2023), menemukan bahwa distribusi bantuan sosial yang tidak disertai validasi data penerima menyebabkan ketidaktepatan sasaran hingga 20% di beberapa kabupaten di Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem verifikasi dan transparansi dalam pelaksanaan. Sementara itu, studi oleh (Yuniati & Anne Putri, 2023) menunjukkan bahwa keberhasilan program bantuan sangat bergantung pada perencanaan anggaran dan koordinasi antarinstansi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai tinjauan penyaluran bantuan sosial oleh Dinas Sosial Provinsi Aceh pada tahun 2024. Pendekatan ini dipilih karena keterbatasan akses terhadap data kuantitatif formal, sehingga informasi utama diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait dan analisis dokumen yang tersedia. Sumber data dalam penelitian ini bersifat primer, diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan staf Dinas Sosial Aceh yang terlibat dalam pelaksanaan dan pengawasan program bantuan sosial. Selain itu, data juga diperoleh dari dokumen sekunder terbatas, seperti laporan tahunan program Bantuan Sosial tahun 2024.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Wawancara dengan staf Dinas Sosial Aceh, termasuk pejabat penyalur dan pengelola program PKH dan BPNT dan studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah laporan realisasi bantuan, ringkasan kegiatan, dan dokumen internal Dinas Sosial Aceh. Untuk mendukung validitas analisis efektivitas, penelitian ini juga menggunakan data perencanaan atau target dari program PKH dan BPNT tahun 2024 yang diperoleh dari dokumen internal Dinas Sosial Provinsi Aceh, seperti rencana distribusi triwulanan, rekap penerima manfaat, dan rencana anggaran penyaluran. Target-target tersebut digunakan sebagai tolok ukur untuk membandingkan dengan hasil realisasi dan menjadi dasar analisis kesesuaian (tepat jumlah), kepatuhan waktu distribusi (tepat waktu), cakupan penerima (tepat sasaran), serta efisiensi pelaksanaan program. Dengan demikian, setiap indikator efektivitas dianalisis berdasarkan kesenjangan antara target dan realisasi aktual**.**

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil wawancara dan dokumentasi dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan utama

dikonfirmasi melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data dari wawancara dengan dokumen laporan tahunan. Penelitian ini menghadapi keterbatasan dalam mengakses data mengenai laporan pengaduan dan penyimpangan dalam distribusi bantuan sosial. Oleh karena itu, dimensi efektivitas dari sisi akuntabilitas publik dan keluhan masyarakat tidak dapat dianalisis secara mendalam. Penilaian peninjauan difokuskan pada indikator yang datanya tersedia dan dapat dipertanggungjawabkan secara empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen dari Dinas Sosial Provinsi Aceh, penyaluran bantuan sosial melalui dua program utama Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang tergolong efektif. Tingkat realisasi penyaluran PKH melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) mencapai 100%, melalui POS sebesar 92%, dan BPNT berhasil disalurkan sebesar 92,37% dari total target penerima. Ini menunjukkan bahwa dari aspek *tepat jumlah*, distribusi telah sesuai dengan rencana dan kebutuhan. Distribusi bantuan juga berlangsung sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, dengan capaian indikator *tepat waktu* sebesar 100%, mencerminkan efisiensi administratif yang tinggi. Dari segi *tepat sasaran*, sebanyak 92,17% penerima telah memenuhi kriteria resmi, seperti keluarga miskin, ibu hamil, lansia, serta penyandang disabilitas berat. Capaian ini mencerminkan efektivitas mekanisme verifikasi dan validasi data penerima manfaat di tingkat daerah.

Tabel 1. Perbandingan Target dan Capaian Penyaluran Bantuan Sosial di Aceh Tahun 2024

Indikator	**Program**	**Target 2024**	**Realisasi 2024**	**Persentase Capaian**
Tepat Sasaran	PKH	123.348 KPM*	113.681 KPM*	92,17%
	BPNT	Rp. 97.634.575.000	Rp. 90.196.700.000	92,37%
Tepat Waktu	PKH	2 tahap (Jadwal SP2D)	2 tahap selesai	100%
	BPNT	2 tahap	2 tahap selesai	100%
Tepat Jumlah	PKH	Rp. 97.634.575.000	Rp. 90.196.700.000	92,37%
	BPNT	123.348 KPM	113.681 KPM	92,17%
Efisiensi Penyaluran	Gabungan	Seluruh kab/kota di Aceh mendapatkan alokasi	Penyaluran selesai di seluruh kab/kota	Efisien

Sumber: Data Dinas Sosial Aceh Tahun 2024, diolah oleh penulis.

Keterangan:

- *KPM* (Keluarga Penerima Manfaat) adalah jumlah rumah tangga penerima bantuan sosial.
- Data *Target 2024* mengacu pada jumlah KPM dan nilai dana yang tercantum dalam SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Tahap I dan Tahap II Tahun 2024.
- *Realisasi 2024* adalah data hasil penyaluran yang berhasil diterima oleh KPM berdasarkan laporan "Berhasil Salur".
- Persentase capaian dihitung dari total realisasi dibandingkan dengan total target (baik dari segi jumlah KPM maupun nominal dana).
- Program PKH dan BPNT merupakan dua jenis bantuan sosial utama di Provinsi Aceh.

- Efisiensi penyaluran diukur dari kelancaran distribusi tanpa hambatan administratif atau teknis di seluruh kabupaten/kota.

Berdasarkan data penyaluran bantuan sosial tahap I dan II tahun 2024 di Provinsi Aceh, terlihat bahwa implementasi program bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) berjalan dengan baik, menunjukkan capaian yang tinggi pada hampir semua indikator utama. Berdasarkan data tepat sasaran, tercatat sebanyak 55.860 KPM (Tahap I) dan 57.821 KPM (Tahap II) berhasil menerima bantuan dari total target masing-masing 61.151 dan 62.197 KPM. Ini berarti rata-rata capaian penerima bantuan mencapai 91,35% pada tahap I dan meningkat menjadi 92,96% pada tahap II, menunjukkan perbaikan efektivitas dalam penyaluran dari waktu ke waktu. Capaian ini sejalan dengan hasil wawancara dan telaah dokumen dari Dinas Sosial Provinsi Aceh, yang menyebut bahwa tingkat ketepatan sasaran PKH mencapai 92,17%, dengan penerima manfaat yang telah diverifikasi sebagai keluarga miskin, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas berat. BPNT bahkan mencapai 92,37% realisasi dari target.

Indikator tepat waktu juga menunjukkan performa yang baik. Sebagian besar kabupaten/kota telah menyalurkan bantuan sesuai jadwal yang ditetapkan, dengan efektivitas penyaluran tahap mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem distribusi yang dijalankan baik melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) maupun PT POS Indonesia berjalan relatif lancar.

Dari aspek tepat jumlah, total dana yang dicairkan (SP2D) pada tahap I mencapai Rp48,3 miliar, dengan dana berhasil disalurkan sebesar Rp44,3 miliar (91,65%). Pada tahap II, dari Rp49,3 miliar yang dicairkan, Rp45,9 miliar berhasil disalurkan (93,10%). Angka ini mendekati target yang telah ditetapkan, menunjukkan ketepatan dalam pengelolaan alokasi anggaran.

Adapun dalam aspek efisiensi penyaluran, laporan menyebut bahwa distribusi bantuan berlangsung tanpa hambatan signifikan di lapangan. Ini mengindikasikan bahwa dari sisi operasional dan administratif, proses penyaluran telah berjalan sesuai dengan SOP dan rencana teknis.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program bantuan sosial di Aceh tahun 2024 dapat dikategorikan efektif dan efisien, dengan capaian indikator yang stabil dan peningkatan performa dari tahap I ke tahap II. Temuan ini mendukung pernyataan bahwa sistem penyaluran bantuan sosial di Aceh telah menunjukkan perbaikan dari segi akurasi data, kecepatan distribusi, serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun penyaluran bantuan sosial di Provinsi Aceh pada tahun 2024 sudah berjalan dengan baik dan mencapai banyak target, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal ketepatan sasaran, penguatan kapasitas daerah dengan capaian rendah, dan diversifikasi jalur distribusi. Dengan langkah-langkah perbaikan yang tepat, diharapkan penyaluran bantuan sosial dapat lebih optimal dan merata di seluruh wilayah Aceh, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan keterbatasan signifikan terkait dimensi akuntabilitas. Meskipun Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menyediakan sistem pelaporan pengaduan masyarakat secara terpusat, data tersebut tidak dapat diakses langsung oleh Dinas Sosial Provinsi maupun publik untuk keperluan evaluasi independen atau penelitian. Akibatnya, aspek evaluasi terhadap laporan penyimpangan dan pengaduan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dalam penelitian ini. Keterbatasan ini mencerminkan kurangnya integrasi dan keterbukaan informasi antara pusat dan daerah, serta menunjukkan lemahnya basis data untuk membangun sistem akuntabilitas berbasis lokal.

Sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Ulpa & Martiningsih, 2025), menekankan pentingnya transparansi dalam mekanisme pengaduan publik sebagai indikator utama efektivitas program bantuan sosial. Penelitian mereka menemukan bahwa keterbukaan akses data pengaduan masyarakat sangat berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan kepercayaan publik. Namun, pada penelitian ini ditemukan keterbatasan dalam akses data pengaduan di tingkat daerah, sehingga evaluasi terhadap aspek akuntabilitas menjadi kurang menyeluruh. Begitu juga dengan hasil studi oleh (Radeana et al., 2024) yang juga menyoroti bahwa kurangnya transparansi dalam pelaporan pengaduan dapat menghambat deteksi penyimpangan dan mengurangi efektivitas pengawasan. Selanjutnya hal ini juga di dukung oleh (Etin Indrayani, 2023; Saputra et al., 2025) menambahkan bahwa sistem monitoring yang lengkap dan integrasi data antara pusat dan daerah merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, hambatan teknis dan birokrasi seringkali menjadi kendala dalam pengelolaan data pengaduan secara efektif di tingkat daerah.

Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami penyebab keterbatasan akses data pengaduan di Dinas Sosial Provinsi Aceh, baik dari aspek teknis maupun regulasi. Selain itu, studi perbandingan dengan provinsi lain yang memiliki sistem pelaporan pengaduan yang lebih terbuka dapat memberikan gambaran mengenai potensi perbaikan sistem akuntabilitas di Aceh. Penelitian kualitatif terkait hambatan administratif dan persepsi publik terhadap transparansi penyaluran bantuan sosial juga penting dilakukan untuk memperkuat pemahaman tentang dampak keterbatasan akuntabilitas terhadap kepercayaan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penyaluran bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) pada tahun 2024 di Provinsi Aceh, dapat disimpulkan bahwa sistem penyaluran bantuan sosial di provinsi ini telah menunjukkan kinerja yang cukup efektif. Dari sisi ketepatan jumlah, distribusi bantuan pada kedua program ini sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan capaian rata-rata sebesar 91-93%. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi bantuan telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

Namun demikian, terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat keberhasilan penyaluran antara beberapa daerah di Aceh. Misalnya, beberapa kabupaten/kota seperti Kota Banda Aceh dan Kota Sabang menunjukkan angka penyaluran yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya, mencerminkan adanya ketimpangan efektivitas penyaluran di tingkat lokal. Ini menunjukkan adanya tantangan dalam koordinasi, pelaksanaan teknis, maupun kapasitas masing-masing daerah untuk melakukan distribusi bantuan. Selain itu, dari sisi ketepatan sasaran, meskipun 92% penerima bantuan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, masih ada 8% penerima yang tidak sesuai dengan data yang terverifikasi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ketidakcocokan ini berpotensi menimbulkan masalah dalam efisiensi penggunaan anggaran, serta bisa berisiko menimbulkan kecemburuan sosial, terutama bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh bantuan tersebut.

Di tinjau dari segi ketepatan waktu, penyaluran bantuan berjalan cukup baik dengan tingkat capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi bantuan telah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Namun, efektivitas program dari sisi akuntabilitas dan transparansi publik masih terbatas, terutama akibat tidak tersedianya akses terhadap data pengaduan dan laporan penyimpangan di tingkat daerah. Sistem pelaporan yang terpusat di Kementerian Sosial, tanpa

keterbukaan di tingkat provinsi, menjadi kendala dalam membangun kontrol sosial dan evaluasi berbasis bukti di tingkat lokal. Keterbatasan ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam mewujudkan sistem penyaluran bantuan sosial yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga terbuka dan partisipatif.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial di Provinsi Aceh pada masa mendatang:

1. Pemutakhiran Data Penerima Secara Berkala
   Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dinas Sosial Provinsi Aceh perlu memperkuat mekanisme verifikasi dan validasi data di tingkat desa atau kecamatan untuk mengurangi kesalahan dalam penyaluran bantuan. Pemutakhiran ini harus melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah daerah, pemerintah desa, serta masyarakat itu sendiri.
2. Peningkatan Kapasitas Daerah dengan Capaian Rendah
   Daerah yang menunjukkan capaian penyaluran di bawah rata-rata, seperti Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kota Nagan Raya, memerlukan pendampingan dan bimbingan lebih lanjut dalam hal teknis penyaluran bantuan. Hal ini mencakup pelatihan bagi petugas lapangan dan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bantuan sampai tepat waktu dan tepat sasaran.
3. Diversifikasi Jalur Penyaluran Bantuan
   Mengingat bahwa Bank Syariah Indonesia telah menunjukkan tingkat penyaluran 100%, sementara POS Indonesia memiliki capaian yang lebih rendah, penting untuk mempertimbangkan diversifikasi jalur distribusi bantuan. Pemerintah daerah bisa menggali potensi lembaga lain, seperti fintech yang sudah terverifikasi atau koperasi desa, untuk mempercepat distribusi dan memperkecil ketergantungan pada satu saluran penyaluran yang berisiko terhambat.
4. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi
   Pengembangan sistem monitoring digital yang terintegrasi secara real-time akan sangat membantu dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah penyaluran dengan cepat. Dengan adanya dashboard monitoring yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, kendala atau hambatan dalam penyaluran bisa diatasi lebih cepat.
5. Sosialisasi yang Lebih Luas dan Terintegrasi
   Untuk mengurangi kebingungan di masyarakat terkait dengan penyaluran bantuan, terutama yang terkait dengan waktu dan mekanisme, sosialisasi yang lebih luas perlu dilakukan. Program PKH dan BPNT perlu lebih terintegrasi dalam hal komunikasi publik sehingga penerima manfaat tahu persis kapan dan bagaimana mereka akan menerima bantuan, serta apa yang menjadi kriteria mereka untuk mendapatkan bantuan.
6. Penguatan sistem pengaduan dan evaluasi publik di tingkat lokal.
   Saat ini, meskipun laporan pengaduan masyarakat telah tersentralisasi di Kementerian Sosial, ketiadaan mekanisme lokal yang responsif dan terbuka menimbulkan kesenjangan pengawasan langsung di lapangan. Oleh karena itu, pengembangan kanal pelaporan

masyarakat seperti posko pengaduan daerah, dashboard pelaporan terbuka, serta sistem umpan balik dari penerima manfaat akan sangat berperan dalam membangun kepercayaan publik dan efektivitas layanan sosial.

7. Digitalisasi menyeluruh terhadap proses pencatatan dan pelaporan bantuan sosial, guna mendukung transparansi dan integrasi data antara pusat dan daerah. Keterbukaan sebagian data kepada publik, terutama yang bersifat agregat atau non-privat, penting untuk mendukung evaluasi independen dan studi kebijakan berbasis bukti.
8. Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, baik eksekutif maupun legislatif, perlu memberikan dukungan regulasi dan anggaran yang cukup bagi Dinas Sosial dalam membangun sistem informasi berbasis digital dan terbuka. Dukungan ini mencakup aspek kebijakan untuk membuka akses data, memperkuat perlindungan data penerima manfaat, serta memfasilitasi kolaborasi dengan lembaga eksternal dalam proses evaluasi dan pengawasan.

Dengan implementasi rekomendasi tersebut secara terintegrasi antar tingkat pemerintahan dan sektor masyarakat sipil, program bantuan sosial diharapkan dapat berjalan tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga berdaya guna secara sosial, akuntabel, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

BPS Provinsi Aceh. (2024). *Profil Kemiskinan Penduduk di Provinsi Aceh, Maret 2024*. *4*, 1–5.

Claudia, G., Saragih, V., Manurung, K. C., & Clarissa, N. (2025). Menciptakan keadilan sosial melalui program pemerintah. *Triwikrama: Jurnal Multidisplin Ilmu Sosial*, *7*(12).

Etin Indrayani. (2023). *Integrasi Sistem Layanan Digital* (Issue January).

Follett, L., & Henderson, H. (2023). A hybrid approach to targeting social assistance. *Journal of Development Economics*, *160*. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2022.103002

Pratiwi, D. C., & Imsar, I. (2022). Analisis penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) dinas sosial pada masyarakat Kabupaten Batu Bara. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, *4*(12), 5684–5690. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.2122

Prihantika, I., Rahmadhani, tia panca, & Mulyana, N. (2024). Adaptive Social Protection : A Systematic Literature Review and Research Agenda. *Policy & Governance Review*, *8*(3). https://doi.org/https://doi.org/10.30589/pgr. v8i3.877

Purbaningrum, D., & Adinugraha, H. H. (2024). KETIDAKTEPATAN SASARAN BANTUAN SOSIAL DI DESA. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, *15*(2), 31–44. https://doi.org/https://doi.org/10.36624/jpkp.v15i2.116

Qanun Nomor 11 Tahun. (2013). *Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013*.

Radeana, J. N., Leniwati, D., Juanda, A., & Haryanti, A. D. (2024). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dalam pencapaian good governance. *Akuntansi Dan Teknologi Informasi*, *17*, 206–220. https://doi.org/https://doi.org/10.24123/jati.v17i2.6825

Sanjaya, A. W., & Indarto, K. (2025). IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA KARANG JINAWI KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA. *Journal Administrasi Publik*, *13*(1), 255–266.

Santoso, A., Kurniawati, E., & Dhani, A. U. (2023). Kajian Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, *17*(1), 79–94. https://doi.org/10.35475/riptek.v17i1.176

Saputra, R. R., Wirantari, I. D. A. P., & Lukman, J. P. (2025). Kinerja Inspektorat Provinsi Bali Dalam Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR). *Socio-Political Communication and Policy Review*, *2*(1), 1–13.

Sihombing, R. S. M., Utara, U. S., Bantuan, P., & Non, P. (2024). Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Pada Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Tebing Tanjung Kabupaten Langkat. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, *11*(1), 164–174.

Tamrin, L. (2023). Efektivitas Kerja Pegawai Dinas Sosial Dalam Verifikasi dan Validasi Data Penerima Dana Bantuan Sosial di Kota Pekanbaru. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan*, *7*(1), 177–182. https://doi.org/https://doi.org/10.35446/diklatreview.v7i1.1347

Ulpa, S. M., & Martiningsih, S. P. (2025). AKUNTABILITAS PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (Configurative Ideographic Study pada Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur). *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, *9*, 1–23.

Widayanti, R., & Rosdiana, W. (2019). Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung. *Unesa*, 1–7. http://www.pu.go.id/m/main

Wu, B. (2025). Income Inequality, Food Aid, and "Zero Hunger": Evaluating Effectiveness During Lula's Administration. *Cornell University*. https://doi.org/https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.16126

Yuniati, H., & Anne Putri. (2023). Analisis Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, *9*(5), 1886–1899. https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i5.1498